

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. UUD RI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Disamping itu juga adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan.

Pendidikan inklusif merupakan suatu perkembangan paradigma pendidikan yang menghendaki layanan pendidikan untuk memenuhi semua kebutuhan akan pendidikan semua peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, mental, emosi, status sosial, ekonomi, ras, agama, dan lain-lain dalam seting yang sama. (Sunanto; 2007)

Menurut Sunaryo (2009) Pendidikan inklusif akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan sikap, komitmen, dan keyakinan yang positif dari seluruh guru, staf sekolah dan orang tua dan adanya kolaborasi harmonis antara guru khusus dan guru kelas dalam merancang dan menerapkan Program Pengajaran yang diindividualisasikan (*individualized educational program - IEP*).

Menurut Hermansyah Gagasan pendidikan berbasis nilai kebersamaan didasarkan pada dua isu besar dalam dunia pendidikan dewasa ini, yaitu, 1) pendidikan untuk semua atau *Education For All yang selanjutnya disingkat EFA*, dan pendidikan berbasis keadilan sosial. Prinsip *EFA* telah mendorong dibukanya akses yang seluas-luasnya bagi semua orang untuk mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan gagasan pendidikan berbasis keadilan sosial telah memberikan penajaman makna, baik dalam tataran konsep maupun implementasi *EFA*.

Selanjutnya secara lebih rinci tentang gagasan implementasi pendidikan inklusif tertuang dalam Sunaryo (2009) yang menyatakan secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusif ditingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusif itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak.

Pemahaman tentang pendidikan inklusif merupakan hal yang paling penting terutama bagi para praktisi di dunia pendidikan inklusif agar berjalannya gagasan pendidikan inklusif dengan baik kedepannya, terutama bagi pengambil kebijakan yaitu kepala sekolah dan pelaksana di lapangan yaitu guru, kepala sekolah dan guru harus memahami tentang pendidikan inklusif sebaik mungkin agar kepala sekolah dapat mengambil kebijakan yang dapat mendukung terlaksananya pendidikan inklusif yang baik pula dan guru dapat melaksanakan pendidikan inklusif di lapangan dengan emestinya.

Selanjutnya, kebijakan merupakan salah satu dari dimensi dalam indeks inklusif adalah satu set bahan untuk memandu sekolah melalui proses pengembangan sekolah inklusif. Ini adalah tentang membangun masyarakat yang mendukung dan mendorong prestasi tinggi untuk semua staf dan siswa. Kebijakan-kebijakan yang dibuat mendorong adanya partisipasi siswa dan staf sejak pertama kali mereka menjadi bagian dari sekolah, menjangkau semua siswa di lingkungan sekolah, serta meminimalisir adanya tekanan ekslusiner,

semua kebijakan menggunakan strategi perubahan yang jelas, yang dimaksud dengan dukungan di sini adalah semua kegiatan yang meningkatkan kapasitas sekolah untuk menggapai perbedaan siswa. Semua bentuk dukungan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip inklusif dan disatukan dalam sebuah kerangka tunggal.

Proses pembelajaran dalam setting inklusif membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan masing-masing. Model pembelajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru di sekolah, ditujukan agar peserta didik mampu berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalan kemampuan diri peserta didik yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi ini terdiri dari empat ranah yang perlu diukur meliputi kompetensi fisik, kompetensi efektif, kompetensi sehari-hari dan kompetensi akademik. Kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif adalah kurikulum yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

Salah satu dari gagasan pendidikan inklusif yang penting adalah sistem pendukung, beberapa sistem pendukung yang diperlukan guna memperlancar pembelajaran pendidikan inklusif, yaitu: sekolah dan guru yang ramah, *resource center* (pusat sumber), perluasan peran dan tugas SLB, kemitraan dengan lembaga terkait, dukungan orangtua, dan kebijakan pemerintah.

Dalam tataran operasional di sekolah, sekalipun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah inklusif, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi gagasan pendidikan inklusif adalah (1) Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah

regular dalam rangka *give education right* and kemudahan *access education*, and *againt discrimination*. (2) Pendidikan inklusif cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. (3) Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan *komplain* orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan.

Permasalahan lainnya yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diantaranya, dari segi pemahaman secara umum pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah regular dalam rangka *give education right* dan kemudahan *access education*, and *againt discrimination*. Pendidikan inklusif cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan *komplain* orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan.

Permasalahan yang ditemui di lapangan, masih banyak guru yang belum memahami tentang pendidikan inklusif sebagaimana mestinya seperti dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk *team teaching*, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan *flexible curriculum*, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar, dan guru kelas masih dipandang *not sensitive and proactive yet to the special needs children*. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan *media*, *resource*, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui diatas peneliti berkesimpulan bahwa di kebanyakan sekolah yang telah menjalankan pendidikan inklusif masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari segi kebijakan sekolah dan dukungan administrasi sekolah terhadap pendidikan inklusif dimana ada beberapa sekolah yang telah menjalankan sistem pendidikan inklusif, kebijakan sekolah mengenai anak yang diinkluskikan belum terlaksana dengan baik sesuai peraturan. Hampir keseluruhan sekolah memiliki visi dan misi tentang pendidikan inklusif, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang semestinya. Hal ini disebabkan oleh SDM penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah masih belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan pendidikan inklusif dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang pendidikan inklusif.

Bukittinggi merupakan salah satu kota yang dicanangkan sebagai kota inklusif yang baru diresmikan pada bulan April 2014 yang lalu, dalam website resmi pemerintahan kota Bukittinggi (<http://www.bukittinggikota.go.id/>), saat ini terdapat 21 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang diharapkan dapat menampung sekitar 1.000 anak berkebutuhan khusus, termasuk yang di sekolah luar biasa (SLB). Didampingi Kadisdikpora Ellia Makmur, pada Singgalang Wako menjelaskan terdapat tiga dari sepuluh SMA yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (30 persen), dua dari 12 SMK (16,7 persen), enam dari 11 SMP (54,5 persen) dan sepuluh dari 65 sekolah dasar (15,4 persen).

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah penyelenggara inklusif di kota Bukittinggi, dari studi pendahuluan yang peneliti lakukan, peneliti menilai masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah penyelenggara inklusif, pada sekolah inklusif disediakan masing-masing satu guru pendidikan khusus (GPK), dimana setiap kelas harus memiliki maksimal satu siswa berkebutuhan khusus, namun yang ditemui di lapangan setiap kelas menampung lebih banyak siswa berkebutuhan khusus, oleh karena itu guru kelas dituntut untuk dapat memahami secara dalam tentang pendidikan inklusif, namun karena masih

kurangnya pelatihan dan minat guru membuat guru belum begitu memahami tentang pendidikan inklusif, kurangnya pemahaman guru kelas tentang pendidikan inklusif kerap kali sepenuhnya hanya mengandalkan guru pendidikan khusus untuk menangani siswa berkebutuhan khusus di kelas.

SD Islam Al-Azhar kota Bukittinggi (yang selanjutnya disebut SD X), yang merupakan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yang beralamat di Jalan Tdr Parak Konsi kota Bukittinggi provinsi Sumatera Barat. Dari jumlah total 252 siswa, sebanyak 53 siswa diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan dan sedang, tunadaksa sedang, tunalaras, autisme, tunaganda dan penderita kesulitan belajar atau lambat belajar. “Dari 53 siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini, hanya lima siswa yang diberi Guru Pendidikan Khusus (GPK), Selain itu juga didatangkan Guru Kunjung Khusus yang didatangkan dari SLB.

Pada tanggal 18 November 2013 kepala sekolah SD X menerima penghargaan *Inclusive Education Award* atau penghargaan Pendidikan Inklusif 2013 kategori kepala sekolah dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Inclusive Education Award* merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada orang yang peduli terhadap pembelajaran dan pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas yang menyatakan bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah, namun SD X mampu menunjukkan SD X dapat melaksanakan pendidikan inklusif yang baik sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dalam pendidikan inklusif. Selain peran serta kepala sekolah dan manajemen pendidikan inklusif yang baik tentu dibutuhkan juga pemahaman guru yang baik tentang pendidikan inklusif. Namun di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lainnya kebanyakan memang masih belum menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana mestinya, dan juga masih banyak guru yang belum memahami tentang pendidikan inklusif itu sendiri.

Berdasarkan hal ini SD X dapat dijadikan salah satu contoh bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lainnya yang berada di kota Bukittinggi, baik dalam manajemennya, kebijakan kepala sekolah, sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus, dan juga guru di SD X dapat menjadi contoh bagi guru-guru di sekolah inklusif lainnya tentang bagaimana memahami dan menjalankan pendidikan inklusif dengan baik.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan uraian di atas tersirat makna bahwa perlu adanya pengkajian yang mendalam terhadap implementasi gagasan pendidikan inklusif di SD X, untuk itu peneliti menfokuskan penelitian ini pada “Bagaimanakah Implementasi Gagasan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar X Kota Bukittinggi?”.

C. Pertanyaan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan maka dapat dirumuskan hal pokok yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support sistem

1. Bagaimanakah pemahaman tentang pendidikan inklusif di SD X kota Bukittinggi?
2. Apa sajakah kebijakan tentang pendidikan inklusif di SD X kota Bukittinggi?
3. Bagaimanakah proses pembelajaran pada kelas inklusif di SD X kota Bukittinggi?
 - a. Perencanaan pembelajaran pada kelas inklusif di SD X kota Bukittinggi?
 - b. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas inklusif di SD X kota Bukittinggi?
 - c. Evaluasi pembelajaran pada kelas inklusif di SD X kota Bukittinggi?

4. Apa sajakah sistem pendukung pendidikan inklusif yang terdapat pada SD X kota Bukittinggi?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang “Implementasi gagasan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar X kota Bukittinggi”

2. Tujuan khusus.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang:

- a. Pemahaman tentang pendidikan inklusif di SD X kota Bukittinggi.
- b. Kebijakan tentang pendidikan inklusif di SD X kota Bukittinggi.
- c. Proses pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif di SD X kota Bukittinggi.
 - 1) Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif di SD X Kota Bukittinggi.
 - 2) Pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif di SD X Kota Bukittinggi.
 - 3) Evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif di SD X Kota Bukittinggi.
- d. Sistem pendukung pendidikan inklusif pada SD X Kota Bukittinggi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai rujukan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Sekolah.

Bagi SD X, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif dan sebagai evaluasi dalam pengembangan pendidikan inklusif. Bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lain, SD X dapat dimanfaatkan sebagai salah satu contoh dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah masing-masing.

b. Bagi Guru.

Sebagai bahan masukan dan informasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif terutama tentang pelaksanaan pembelajaran di SD X dan sebagai bahan evaluasi serta acuan dalam memberikan pelayanan inklusif.

c. Bagi Kepala Sekolah.

Sebagai bahan masukan dan informasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif terutama tentang kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah di SD X dan agar kepala sekolah lebih mengetahui perannya dalam pengambilan kebijakan tentang pendidikan inklusif dan agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

d. Bagi dinas pendidikan.

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan kebijakan implementasi pendidikan inklusif dan meningkatkan sistem pendukung pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

e. Bagi Peneliti selanjutnya.

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi data untuk penelitian lebih lanjut terkait implementasi gagasan pendidikan inklusif di sekolah dasar dengan menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam agar semua permasalahan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar dapat lebih diungkapkan.